

Analisis==> Kegamangan KPK Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Kedaulatan Rakyat
16/06/2011 08:19:17

PERKEMBANGAN terakhir lagi-lagi menunjukkan bahwa korupsi merupakan extra-ordinary crime, sebuah kejahatan luar biasa yang pemberantasannya juga menuntut usaha dan semangat luar biasa. Bahkan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang masih dipercaya rakyat untuk memberantas korupsi menunjukkan kegamangan melihat betapa besarnya kekuatan yang harus dihadapi. Kasus Bank Century yang dulu secara politik berproses dengan ingar-bingar kini mencapai titik anti-klimaks setelah ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat kerja dengan Kapolri dan DPR menyatakan bahwa tidak ada bukti pidana. Rakyat kini hanya bisa menebak-nebak apa yang terjadi dalam kasus Century dan mungkin harus menunggu pergantian rezim untuk mengetahui cerita sesungguhnya.

Dalam kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, KPK sudah beberapa bulan mengidentifikasi Nunun Nurbaeti sebagai pelaku dan saksi kunci untuk mengurai siapa saja yang terlibat. Kemajuan KPK untuk menyidik kasus ini terkesan sangat lambat. Setelah Nunun menghilang ke luar-negeri selama sebulan, KPK baru mengirimkan surat cekal kepada pihak Imigrasi.

Kasus korupsi yang melibatkan mantan bendahara partai Demokrat Nazaruddin tampaknya akan mengalami nasib serupa. Nazaruddin diduga menerima suap sebesar 13% dari proyek senilai Rp 191 miliar dari pengadaan wisma atlet di Jakabaring Palembang. Juga ada dugaan keterlibatannya di beberapa proyek Kenakertrans. Ketika dugaan sudah semakin kuat, KPK tidak menetapkan status Nazaruddin sebagai tersangka kendatipun yang bersangkutan sudah dipecat dari kepengurusan Partai Demokrat. Setelah Nazaruddin terbang ke Singapura pada tanggal 23 Mei, sehari berikutnya baru KPK menetapkan status cekal dan memberitahu pihak Imigrasi.

Ada sederet kasus yang dapat disebut mengenai kasus-kasus yang berjalinkelindan dengan para elite politik di republik ini. Tapi dari penanganan tiga kasus besar ini, kesimpulan yang segera dapat ditarik adalah bahwa para pimpinan KPK masih gamang untuk memburu koruptor yang memiliki backing politik yang kuat. Sejak dibentuk dengan UU No 30 tahun 2002, KPK sebenarnya sudah berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat dalam hal pemberantasan korupsi. Setidaknya, rakyat masih memiliki simpati dan harapan yang kuat terhadap KPK jika dibanding lembaga penegak hukum yang lain seperti jajaran kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Namun demikian, tampaknya KPK baru bisa menjerat koruptor yang kelas teri belum bisa menjangkau kelas kakap. Penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan, hakim Irawadi Joenoes, atau hakim Syarifuddin dalam kasus suap betapapun masih termasuk kelas menengah atau kelas bandeng, kesemuanya adalah operator individual dan bukan termasuk sosok yang memiliki backing politik tinggi.

Apa yang mengakibatkan kegamangan para pendekar hukum di KPK? Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi hal ini. Pertama, komitmen politik dari pimpinan politik puncak yang masih lemah. Dalam hal ini komitmen presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan dan pimpinan DPR

sebagai lembaga legislatif rupanya masih sebatas wacana. Dan itu membingungkan. Contohnya, izin dari presiden untuk memeriksa sejumlah kepala daerah yang tersangkut politik menunjukkan isyarat positif. Tetapi ketika presiden sendiri memberikan remisi bagi koruptor yang sudah dipenjarakan tanpa pertimbangan jelas, publik tentu akan mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi tersebut.

Kedua, karena korupsi politik akan menyeret banyak anggota DPR dan para pimpinan parpol, medan perang untuk memberantas korupsi begitu luas sedangkan KPK semakin mudah menjadi sasaran tembak. Fenomena politik yang menunjukkan pola perilaku korupsi berjamaah semakin menyulitkan posisi KPK.

Ketiga, posisi pimpinan KPK sekarang ini praktis sangat lemah dari sisi legal-prosedural. Busyro Muqoddas hanya menjabat untuk waktu setahun di KPK dan kini sudah menjelang berakhir. Dibanding dengan hiruk-pikuk pemilihannya oleh DPR yang menelan biaya begitu besar, masa jabatan setahun ini sebenarnya begitu ironis. Anggota pimpinan KPK dalam waktu dekat juga akan berakhir masa jabatannya.

Lantas, melihat begitu banyak faktor yang menghambat kinerja KPK sebagai salah satu lembaga yang masih dipercaya oleh rakyat, apa yang masih bisa dilakukan? Dukungan rakyat dan semua unsur yang ingin mengenyahkan korupsi dari bumi Indonesia sekali lagi merupakan kunci utama. Terlepas dari banyak kelemahan struktural yang ada di KPK, semua pihak harus secara konsisten berada di belakang lembaga ini. Hendaknya dipahami bahwa rakyat Indonesia tetap akan terbelenggu oleh kemiskinan jika membiarkan uang rakyat dijadikan sebagai pesta pora oleh para koruptor yang setiap saat bisa melarikan uang tersebut ke luar negeri. Dukungan yang bersifat total dan tanpa henti inilah yang sekarang diperlukan. (Penulis adalah dosen Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM)-b